

KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA DI DESA PESU KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN

Oleh : Sirajuddin Ismail

1. Pendahuluan

Penelitian tentang Kerukunan Hidup Umat Beragama, tidak terlepas pada suatu gejala keagamaan yang muncul dalam masyarakat, gejala kemasyarakatan tersebut tidak berdiri sendiri, artinya kedudukan pelaku sebagai penganut agama tidak berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan kedudukan ekonomi, hubungan kerabat, politik dan kehidupan sosial.

Sebelum mengemukakan permasalahan maka terlebih dahulu mengemukakan pengertian kerukunan hidup umat Beragama. Rukun adalah mengakui adanya perbedaan dan menghargai perbedaan tersebut. Hidup atau kehidupan adalah suatu keadaan atau proses yang dilakukan manusia untuk tetap dapat hidup; antara lain misalnya makan dan minum, dapat berfungsi, membutuhkan komunikasi dengan sesama, membutuhkan berfikir, merasakan, mengungkapkan emosi, meyakini yang benar/hak menolak yang batil untuk dijadikan pedoman ahlak, moral, etika dan estetika. Oleh sebab itu di dalam kegiatan manusia hidup dalam berbagai tingkat dan macam pengorganisasian kegiatan yang diyakini kebenarannya, yang terwujud sebagai pranata-pranata sehingga semua kegiatan itu nampak teratur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, waktu, tempat dan unsur-unsur yang ada di dalam kegiatan tersebut. (Suparlan, 1991 : 29) Umat adalah

bahasa arab yang sama pengertiannya dengan masyarakat dalam pengertian antropologi. Masyarakat adalah suatu satuan kehidupan sosial manusia yang menempati suatu wilayah tertentu, yang teratur dalam kehidupan sosial tersebut telah memungkinkan karena adanya seperangkat pranata-pranata sosial yang telah menjadi tradisi dan kebudayaan yang mereka miliki bersama. (Suparlan, 1982:83)

Dari konsep tersebut menunjukkan bahwa kerukunan hidup umat beragama adalah mengakui adanya perbedaan dalam kehidupan beragama dan sama-sama menghargai perbedaan tersebut. Kehidupan adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk tetap hidup dan dalam kehidupan keagamaan manusia menggunakan sistem simbol suci untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Masalah kerukunan hidup. Umat Beragama tidak dapat dijelaskan oleh agama tetapi dengan melalui konsep. Konsep digunakan untuk menjelaskan interaksi dalam agama dan pelaku-pelakunya. Jadi agama sebagai atribut dalam interaksi. Dengan demikian maka inti permasalahan yang menjadi kajian mengenai Kerukunan Hidup Umat beragama adalah pengorganisasian identitas dan penggunaannya dalam interaksi. Ketiga masalah pokok tersebut mempunyai pengertian bahwa; Pengorganisasian adalah proses merama sesuatu menjadi terorganisir, teratur menurut

kegiatan sipelaku dan menurut konteksnya. Identitas adalah ciri yang menonjol dan menyeluruh yang dimiliki seseorang yang muncul dalam interaksi, yang digunakan untuk berperan dalam interaksi. Interaksi adalah tindakan timbal balik yang dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih. Dalam pengorganisasian, kegiatan pelaku secara aktif menyeleksi aturan-aturan yang ada untuk diaktifkan dan digunakan sebagai identitas dalam interaksi serta pengorganisasian mengatur macam interaksi yang diinginkan dan di dalam interaksi pelaku menggunakan atau mengaktifkan simbol-simbol yang dapat dimahaminya dan difahami sesuai dengan konteks hubungan yang langsung. Dengan demikian pelaku dituntut mempunyai pengetahuan agar dia mampu untuk meramalkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masing-masing pelaku yang dihadapinya, karena dalam interaksi bukan hanya simbol-simbol yang tersurat saja tetapi simbol-simbol yang tersirat juga diartikan oleh pelaku. (Suparlan, 1991:17)

Berbicara tentang kerukunan umat beragama maka tidak terlepas pada suatu gejala keagamaan yang muncul dalam masyarakat, gejala keagamaan tersebut tidak berdiri sendiri, maksudnya kedudukan pelaku sebagai penganut agama tentu tidak berdiri sendiri, kalau dilihat dari interaksi dengan pelaku lain, artinya kedudukan agama tersebut selalu ada kaitannya dengan kedudukan ekonomi, hubungan kekerabatan, politik, etnik dan kehidupan sosial.

Metode Dan Proses Penelitian.

Penelitian dilakukan di desa Pesu, adalah salah satu desa dari 19 Desa yang berada di

kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, dengan luas Wilayah 100 Ha terdiri dari empat dukuh, 5 RW dan 11 RT, dengan jumlah penduduk 1.769 jiwa, 336 KK. Jumlah penduduk berdasarkan agama, 69.4% beragama Islam, 15.9% beragama Kristen, 13.2% beragama Katolik dan 1.3% beragama Hindu.

Penelitian kerukunan Hidup umat beragama ini dilihat dari sudut pandang antropologi dan dalam penelitiannya adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan holistik, yaitu suatu pendekatan yang melibatkan kerukunan hidup umat beragama dengan mengaitkannya kepada seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kerukunan tersebut. Dalam mengadakan penelitian kerukunan hidup beragama ini selama dua bulan di desa Pesu peneliti ditempatkan di rumah Suropto Cipto Wardoyo. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, selain wawancara juga pengamatan terlibat. Peneliti mewawancarai 10% masyarakat mengenai sejarah, alam dan lingkungannya, ekonomi, lingkaran hidup, pola menetap dan pengelompokan sosial, kehidupan keagamaan, kehidupan politik dan pola-pola hubungan intern dan antar umat beragama. Selain wawancara peneliti juga melakukan pengamatan terlibat, yaitu ikut serta dalam berbagai kegiatan, di masjid mengikuti shalat, pengajian, pengajian akbar (peringatan maulid Nabi Muhammad) dan tahlilan malam Jum'at. Kegiatan Kristen mengamati kebaktian minggu pada gereja, Gereja Kerasulan Baru (GKB), Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Indonesia (GKI) gereja Pantekosta di Indonesia, doa bergilir agama Katolik dan kegiatan di luar

gereja, yakni pendalaman al Kitab (PA) atau sarasehan, selamatan hari-hari kematian, tiga, tujuh, 40, 100, setahun, dua tahun dan seribu hari kematian seseorang pada Kristen GKB dan agama Katolik, juga yang dilakukan oleh orang Islam. Disamping itu juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, antara lain seperti rapat, olah raga, gotong royong dan lain-lain. Pengamatan dilakukan untuk melihat pengorganisasian dan interaksi mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Data yang telah dikumpul dideskripsi dalam buku deskripsi kemudian diperlihatkan pada informan terutama hasil wawancara, untuk menghindari kekeliruan terutama informasi yang diperoleh dengan menggunakan bahasa atau istilah-istilah Jawa. Bahasa merupakan hambatan di dalam pengumpulan data di lapangan, sedangkan dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam kegiatan agama, upacara-upacara baik dalam upacara agama maupun upacara sosial, mereka menggunakan bahasa Jawa.

2. Hasil Penelitian; Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka tersebut di atas bahwa Desa Pesu adalah salah satu desa dari 19 desa yang berada di kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dengan jumlah penduduk 1.769 jiwa, luas wilayah 100 Ha, 75 Ha adalah lahan pertanian (sawah) dengan kepadatan penduduk 1.769 perkilometer bujur sangkar, mata pencaharian mereka antara lain adalah petani pemilik, yaitu petani yang memiliki sawah 23.4% dari jumlah penduduk, sehingga 59% penduduk selain dari pegawai

dan pensiunan mencari nafkah dengan petani penggarap, buruh tani, buruh industri, buruh bangunan, pedagang dan usaha pengangkutan. Walaupun mata pencaharian mereka sebagai petani terkadang taraf hidupnya pas-pasan tetapi mereka memperhatikan pendidikan sehingga hanya 3.3% saja masyarakat yang tidak pernah sekolah, dengan demikian memudahkan mereka memahami sesuatu yang datang dari luar dirinya, mampu berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan tidak menggantungkan hidupnya pada suatu mata pencaharian yang memungkinkan dia tidak bisa berkembang. Di dalam memanfaatkan sumber daya alam, antara petani pemilik, petani penggarap dan buruh tani saling ketergantungan ekonomi, pemilik memerlukan pekerja dan pekerja memerlukan sesuatu pekerjaan untuk memperoleh suatu penghasilan, dalam proses ini mereka tidak menampilkan identitas mereka masing-masing. Kita harus akui bahwa ekonomi adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dari sini timbul istilah kaya dan miskin, menentukan besar kecilnya biaya hidup dan besar kecilnya biaya-biaya lain termasuk biaya upacara, antara lain misalnya biaya lingkaran hidup. Dalam upacara lingkaran hidup melibatkan masyarakat tanpa membedakan kerabat, ekonomi, politik dan agama. Kecuali pada upacara yang bersifat ritual menurut agamanya dan batasan ini dihormati oleh seluruh masyarakat, antarlainmisalnyadalamacaratahlian dan kebaktian dalam upacara selamatan hari kematian seseorang, semua tetangga kenduri diundang tetapi mereka mengetahui posisi mereka di dalam upacara itu, mereka

yang sebenarnya, maka mereka menemukan seorang yang bernama rasul Fasen pada tahun 1966, maka padanya mereka mempelajari dan mendalami tentang gereja kerasulan dan mereka mendirikan gereja kerasulan di desa Pesu dengan nama Gereja Kerasulan Baru (GKB), didirikan oleh Sukarno dkk dan mereka inilah menjadi tokoh GKB, menjadi EV. Pasamuan dan Prister hingga sekarang.

HPK (Himpunan Penganut Kepercayaan, HPK yang terdapat di desa Pesu hanya dua kelompok, yaitu Pangestu dan Sapta Darma. Peneliti mengkategorikan Pangestu sebagai HPK, karena sama-sama penganut kepercayaan seperti aliran kepercayaan lainnya walaupun menurut SE salah seorang tokohnya "... Pangestu tidak termasuk dalam HPK dan setiap ada pengisian formolir dari HPK mereka tidak pernah mengisinya karena mereka hanya bersifat pendidikan atau olah raga...". Pangestu adalah singkatan dari Paguyuban Ngesti Tunggal. Pangestu adalah kelompok pendidikan atau pengolahan jiwa. Ajaran ini atau ajaran Sang Guru Sejati diterima oleh R.Suanarta Mertowardoyodi Surakartapada 14 Februari 1933. R. Suarta selaku pengantara (jw Warana) menyampaikan wejangan sabda penuntun Sang Guru Sajati. Menurut SE "... inti ajaran adalah ilmu sejati, yaitu ilmu yang benar, yang menunjuki manusia suatu kehidupan sampai kealam sejati. Alam sejati adalah Nirwana (surga) dalam bahasa Jawa Sangkan Paraning Urip artinya manusia hidup ada asalnya yaitu dari Tuhan dan besok akan kembali kepada Tuhan ...". Lebih jelasnya inti ajaran Pangestu :

1. Hasta Sila; yaitu delapan dasardan Hasta

Sila terbagi dua :

- a). Tri Sila; sadar atau cling, percaya dan taat.
 - b). Panca Sila; Rela, tawakal, sabar, jujur dan berbudi luhur. Hasta Sila sulit dilaksanakan oleh manusia kecuali dengan jalan rahayu.
2. Rahayu. Jalan rahayu terdiri dari lima macam yang disebut Panca Darma Bakti, yaitu :
- a). Syahadat (Paugran Sukmo Kawckas Dumateng Kawulo) yaitu perjanjian antara umat manusia dengan Tuhan.
 - b). Penembah (sembahyang). Semua warganya diwajibkan sembahyang sesuai dengan agamanya masing-masing dan kalau belum puas maka diberikan tuntunan untuk penembah.
 - c). Budi Darma.
 - d). Mengckang hawa nafsu dengan berpuasa. Puasa menurut ajaran Sang Guru Sejati, bermacam-macam caranya dan tak terbatas waktunya.
 - e). Menuju budi luhur.
3. Paliwara atau larangan. Paliwara lima macam :
- a). Tidak boleh menyembah selain dari pada Allah, antara lain seperti roh-roh halus.
 - b). Berhati-hati dalam syahwat.
 - c). Tidak boleh makan dan minuman yang akan merusak badan jasmani.
 - d). Patuhi undang-undang negara.
 - e). Tidak boleh bertengkar.
4. Dasa Sila. Sepuluh dasar ajaran yang merupakan pedoman hidup warga Pangestu yang disebut papakem yaitu :
- a). Bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b). Berbakti kepada utusan Tuhan.

- c). Setia kepada khalifatullah.
 - d). Berbakti kepada tanah air.
 - e). Berbakti kepada orang tua.
 - f). Berbakti kepada saudara tua.
 - g). Berbakti kepada guru.
 - h). Berbakti kepada ajaran keutamaan.
 - i). Kasihsayangkepadasesamamahluk.
 - y). Menghormati semua agama.
- Pangestu dianut oleh 55 orang (3.1%) dari 1769 jiwa penduduk, tetapi yang aktif hanya 25 orang (1.4%) dan di dalam meningkatkan kualitas warganya, Pangestu mengadakan bowo roso (olah raga), antara lain seperti yang dilakukannya 18 Oktober 1991 dihadiri oleh 17 orang (30.9%) dari warganya, dalam olah raga ini membahas tentang sabda Sang Guru sejati, menurut SE".... Pangestu tidak merusak agama atau bukan merupakan agama baru tetapi merupakan pendidikan jiwa atau olahraga untuk mengantar warganya lebih meyakini agamanya masing-masing...." Tetapi kenyataannya, mereka yang Islam kejawen (tidak amaliyah) tetap kejawen demikian pula yang beragama Kristen yang tidak pernah ke gereja tetap juga tidak ke gereja.

Sapta Darma.

Sapata Darma artinya tujuh kewajiban. Aliran ini didirikan oleh Harjosapuro di kota Pare kabupaten Kediri Jawa Timur pada 27 Desember 1952. Harjosapuro diberi petunjuk oleh yang maha kuasa untuk sujud dan sejak itulah dia mengajarkan orang tentang sujud, sehingga aliran ini juga dikenal oleh warganya dengan ajaran sujud. Inti

ajarannya adalah wewarapitu (ajaran tujuh). Menurut Mardiko".... wewara pitu disebut juga tujuh kewajiban manusia, yaitu : Setia kepada Panca Silanya Allah yakni; Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Waweso (kuasa penuh) dan Maha Langgeng (abadi)....". Tata cara sujudnya, Sapta Darma sujud ketimur, menurut mardiko".... sujud ketimur karena timur adalah sumber kejadian manusia, jadi sujud bukan ke arah timur tetapi jujud ke asal kejadian manusia....". Sujud dilaksanakan pada setiap hari jum'at bertempat di rumahnya Mardiko (dykuh Mawen), sujud dilakukan dua taiap yaitu dilaksanakan pada jam 21.00 dan jam 23.00. Yang sujud pada 27 September 1991, 12 orang semuanya pria terdiri dari Islam 8 orang (66.6%), Katolik 1 orang (8.3%) dan Kristen 3 orang (25 %), jumlah sujud mereka berbeda-beda. Di dalam melakukan sujud mereka duduk bersila berjejer seperti stafhy a orang shalat hanya tidak lurus dan tidak mempunyai imam dan duduk di atas kain berwarna putih ukuran 1 x 1 m. Wanita duduk bersimpuh, konsentrasi, tangan dilipat (sedekap) tangan kanan diatas tangan kiri, sambil mengucapkan pembukaan dengan bahasa apa saja, yaitu kalimat Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, kalimat tersebut diucapkan bila memulai suatu pekerjaan, karena di dalam hidup kita hanya diberi tiga hak yang dikelola, yaitu agung yakni air. Rohim yakni angin (napas). Adil yaitu api (panas).

Septa Darma di desa Pesu didirikan 1963, tetapi bubar pada tahun 1965 dan 1971 diaktifkan kembali oleh seorang penuntun yang bernama mardiko dan beranggotakan

24 orang warga (1.3%) dari 1.769 jiwa penduduk, mereka beragama Islam, Kristen dan Katolik. Sapta Darma di desa Pesu tidak mempunyai struktur organisasi seperti Pangestu yang ada hanya penuntun dan warga.

Dari kerangka tersebut menunjukkan bahwa antara Pangestu dan Sapta Darma mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya, yaitu warganya terdiri dari bermacam-macam agama, mengolah jiwa, dikelola oleh Depdikbud. Sedangkan perbedaannya; Pangestu, tidak mengakui terhimpun dalam HPK, penganutnya mengaktifkan agamanya masing-masing, hanya merupakan boworoso dengan penaburan (ceramah), jiwa yang diolah terlebih dahulu dan tidak mencari gambaran atau ilham. Sapta Darma, termasuk anggota HPK, agama penganutnya pasif, acaranya sujud, yang diolah adalah ciptanya dan sujud untuk mencari gambaran atau ilham.

Dalam kehidupan keagamaan berbeda dengan kehidupan ketetangaan yang tidak memiliki pemimpin, didalam kehidupan keagamaan masing-masing agama mempunyai pemimpin dan dalam kepemimpinannya berdasarkan agama, bukan karena kerabat, politik dan ekonomi. Walaupun dalam agama Kristen ada saling ketergantungan ekonomi antara pemimpin (pendeta, romo dan lain-lain) dengan jemaatnya, karena mereka digaji oleh gereja yang sumber dananya adalah dari jemaatnya. Manusia adalah mahluk sosial yang salah satu unsurnya adalah hidup berkelompok, sedangkan kehidupan keagamaan adalah salah satu bentuk kehidupan manusia, dimana saja manusia hidup berkelompok

maka akan timbul prasangka dan stereotif, tetapi prasangka dan stereotif yang timbul dalam masyarakat desa Pesu tidak terbukti, antara lain stereotif umat Kristen terhadap Islam tentang pembangunan gereja GKI Pesu, mereka menganggap umat Islam dan pemerintah (Departemen agama) menghalang-halangi pembangunan gereja, sebenarnya mereka sendiri yang belum memenuhi semua persyaratan pembangunan suatu rumah ibadah.

Dalam kerangka tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan keagamaan tidak ada hubungan kekerabatan, politik dan ekonomi, namun dalam kehidupan politik masyarakat cenderung mengikuti aspirasi politik pimpinan agama mereka, Islam amaliyah secara tidak langsung jemaahnya mengikuti tokoh (pemimpin) walaupun pemimpinnya tidak mengharapkan mereka untuk mengikuti aspirasi politiknya. Kalau dalam agama Kristen seperti GKJ, pemimpinnya dengan tegas mewajibkan jemaatnya memilih Golkar karena bersumber dari firman dalam Al Kitab Rum 13: 1, bahwa umat Kristiani diperintahkan untuk mengikuti pemerintah yang di atas, karena tidak ada pemerintah yang bukan dari Allah. Tidak menghecrankan kalau Ad mewajibkan jemaatnya untuk memilih Golkar dengan dalil dari firman karena dia sendiri adalah ketua komisariat desa (komdes) Golkar desa Pesu, hal inilah yang merupakan salah satu faktor pendukung kemenangan Golkar (73%) dalam pemilihan Umum tahun 1987.

Walaupun masyarakat berbeda aspirasi politiknya tetapi identitas itu tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari

dan hal ini hanya diwujudkannyamenjelang Pemilihan Kepala Desa (Komdes) dan menjelang pemilihan Umum, karena pada kedua peristiwa ini masyarakat harus menggunakan hak pilihnya sebagai warga desa atau sebagai warga negara, namun identitas ini hanya bersifat sementara selama pemilihan, sehingga dalam kehidupannya mereka tetap rukun kecuali hanya 6 orang (0.3%) saja yang tidak rukun hingga sekarang, disebabkan karena dendam pribadi aki bat kekalahannya dalam pemilihan kepala desa pada tahun 1980. Bukti kerukunan mereka dapat dilihat pada kerja sama mereka dalam kehidupan sosial, baik dalam upacara hidup maupun dalam upacara kematian, sehingga kuburan seluruh pemeluk agama yang berada di Pesu terdapat pada satu kompleks makam.

Masyarakat desa Pesu adalah masyarakat yang sangat menghormati leluhur sehingga untuk menghormatinya maka setiap tahun diadakan upacara sadranan. Sadranan, yaitu suatu upacara khusus dilakukan dimakam sekali setahun dan diadakan pada setiap 20 Ruwah di makam Sarap dan 25 Ruwah di makam Pesu. Sehari sebelum upacara sadranan (18 Ruwah) dilakukan kerja bakti secara massal oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan agama dan upacara sadranan diikuti oleh seluruh masyarakat yang mempunyai leluhur yang dimakamkan di pemakaman tersebut dan yang memimpin upacara ini adalah modin dan seluruh hadirin mengikuti upacara dengan tekun hingga selesai dan semua peserta mengucapkan amin ketika modin membacakan doa.

3. Kesimpulan.

Dari kerangka tersebut di atas menunjukkan bahwa batas sosial dalam kehidupan masyarakat desa Pesu adalah pada masalah yang bersifat ritual dalam keyakinan agama masing-masing, sedangkan dalam kehidupan sosial mereka melakukannya dengan adat Jawa dan tidak mempermasalahakan agama.

Kondisi yang menunjang timbulnya kerukunan adalah adalah suatu prinsip masyarakat yang menganggap semua agama itu sama dan semuanya membawa manusia kepada kebaikan sehingga dalam masalah interaksi apapun mereka tidak menampakan identitas agamanya, turut serta sebagian masyarakat di dalam Himpunan Penganut Kepercayaan (HPK), yaitu pada Pangestu dan Sapta Darma yang menghimpun masyarakat tanpa memilih agama, ekonomi dan politik di dalam kelompoknya karena mereka sama-sama mempunyai tujuan yang ingin mereka capai. Disamping itu adanya kesamaan pandangan masyarakat tentang kebudayaan jawa, mereka sangat menghormati kebudayaan ini dan melaksanakannya dalam kehidupannya. Antara lain misalnya mereka sangat menghormati leluhur, sehingga setiap bulan Ruwah (nama salah satu bulan Jawa) setiap tahun mereka mengadakan upacara Sadranan yang merupakan perwujudan dari pada penghormatan mereka terhadap leluhurnya.

Disamping kondisi yang menunjang timbulnya kerukunan umat beragama, maka suatu hal yang sifatnya akan meng-

kondisikan ketidak rukunan hidup umat beragama pada masyarakat desa Pesu adalah beranjak dari adanya stereotif dan prasangka umat kristiani terhadap umat Islam dan pemerintah (Departemen Agama). Mereka beranggapan bahwa umat Islam menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah GKI Pesu. Mereka juga merasa dianak tirikan oleh pemerintah dengan mempersulit pemberian izin pembangunan rumah ibadah sehingga pembangunannya terkatung-katung dengan menunjuk empat bangunan rumah ibadah, yaitu : Kesulitan-nya dari Departemen agama yaitu pembangunan gereja GKI di desa Pesu dan gereja GIDI di desa Jarina kecamatan Bayat. Dari camat, pembangunan gereja Pantekosta di Indonesia di Desa Dleunggu. Dari kepala Desa, pembangunan gereja GKB di Desa Kurun kecamatan Caper.

4. Saran - Saran .

Dari kesimpulan tersebut diatas maka disarankan bahwa untuk menghindari timbulnya kondisi ketidak rukunan dalam masyarakat desa Pesu, maka pemerintah hendaklah memasyarakatkan tentang peraturan yang berhubungan dengan pendirian suatu rumah ibadah, karena hal tersebut belum memasyarakat terutama di daerah pedesaan seperti di Desa Pesu dan hendaklah umat beragama apabila hendak mendirikan suatu rumah ibadah perlu memperhatikan kondisi masyarakat dan meminta persetujuan masyarakat sekitar tempat yang akan didirikan rumah ibadah.

Bila pemerintah menanggukahkan pemberian izin pembangunan suatu rumah ibadah hendaklah dijelaskan kepada pemohon untuk menghindari prasangka dan stereotip masyarakat dengan sesamasyarakat dan masyarakat terhadap pemerintah.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad Rustandi SH.A, 1987 Gaya Kepemimpinan (Pendekatan Bakat Situasional, Cet.II, Armiko, Jakarta.
- Budiman dalam A.W.Widjaja Drs, 1986 Manusia Indonesia, Individu Keluarga Dan Masyarakat, akademika Pres Sindo, Jakarta.
- Clifford Geertz, 1989 Abangan, Santri, Priyai Dalam Musya Cet.III, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Fredrik Barth, 1988 Kelompok Etnik Dan batasannya, Cet. Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- Hildrest Geerts dan Frahz Magnis Suseno, 1988 Etika Jawa, Sebuah analisa Falsafah Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Cet.III, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kocntjaraningrat, 1984 Kebudayaan Jawa, Cet.I, PN Balai Pustaka, Jakarta
-DKK, 1985 Aspck Manusia dalam penelitian masyarakat, PT.Gramedia, Jakarta.
-, 1984 Masyarakat Desa di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.
- LembagaAlKitabIndonesia, 1991 AlKitab, Lembaga Al Kitab Indonesia, Jakarta.
- Parsudi Suparlan Dr, 1986 Dalam Georges Balandir, ANtropologi Politik, CV. Rajawali, Jakarta.
-1986 Dalam A.W.Widjaja, Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat, Akademika, Pres Sindo, Jakarta.
-, 1991 Makalah pada PPA Ke XIII, Jakarta.